

Perspektif Multi Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang

Siti Aisah^a, Rahmawati^b

^{a,b} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

e-mail : ^a sitiaisaahh18@gmail.com, ^b rahmawati@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (LSM) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan secara bersama-sama. penelitian ini dilatarbelakangi untuk menangani isu-isu utama dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan risiko bencana, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Permasalahan lingkungan di DAS Cisadane seperti degradasi sumber daya air, tanah longsor, dan pencemaran sungai akibat penumpukan limbah, semakin menegaskan pentingnya mekanisme koordinasi dan kerja sama yang efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif pada model collaborative governance Ansell and Gash (2007), dimana aktor yang terlibat ada pemerintah, swasta, akademisi dan non-governmental organization. studi literatur dan teknik analisis data menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi sudah baik tetapi belum optimal terlaksana karena terdapat masalah terkait indikator penelitian, seperti belum peraturan daerah yang mendukung terkait pengelolaan sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Sungai Cisadane.

Collaborative Governance in Waste Management in the Cisadane River Basin in Tangerang City

Abstract

This study aims to identify and analyze Collaborative Governance in waste management in the Cisadane Watershed, Tangerang City, which involves various government stakeholders, the private sector, and civil society organizations (NGOs) in the planning, implementation, and monitoring processes together. This research is motivated to address key issues in waste management, such as disaster risk reduction, improving community welfare, and improving coordination between stakeholders. Environmental problems in the Cisadane Watershed, such as water resource degradation, landslides, and river pollution due to waste accumulation, increasingly emphasize the importance of effective coordination and cooperation mechanisms. The method used in this study is descriptive qualitative with data obtained through observation, interviews, and documentation. The theories used in this study are indicators of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes in the collaborative governance model of Ansell and Gash (2007), where the actors involved are government, private sector, academics, and non-governmental organizations. Literature studies and data analysis techniques use techniques according to Miles and Huberman (1984). The research results show that the collaboration that occurred was good but had not been

optimally implemented because there were problems related to research indicators, such as the lack of regional regulations that support waste management in the Cisadane Watershed, Tangerang City.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Cisadane River.

A. PENDAHULUAN

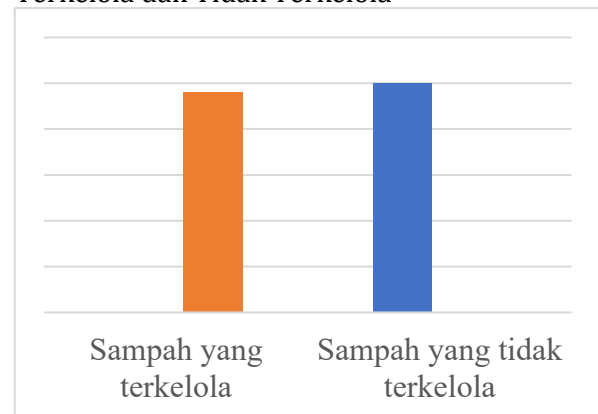
Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,203,9 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 272,682,5 jiwa. Sedangkan pada pertengahan tahun 2022 tercatat sebanyak 275,773,8 jiwa. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan 1,17% jika dibandingkan dengan hasil sensus pada tahun 2021. Menurut Manik (2003), masalah lingkungan dapat dipastikan akan timbul seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat di suatu wilayah. Menurut Soemarwoto (2014), menjelaskan bahwa Pertumbuhan jumlah penduduk akan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut sering kali memicu gaya hidup konsumtif, di mana individu lebih banyak membeli dan menggunakan barang-barang, terutama yang dikemas.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai penyumbang terbesar di dunia setelah India dan Nigeria. Masalah sampah di Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (diakses 17 Mei, 2024) pada tahun 2023 sudah sangat memprihatinkan di mana jumlah timbulan sampah di Indonesia secara nasional (290 kabupaten/kota se-Indonesia) sebanyak 38.477.679,73 juta ton per tahun.

Ada dua penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh

ulah manusia contohnya adalah penggalian tanah pasir atau batu-batuan yang mengandung resiko tanah longsor dan penebangan pohon tanpa penanaman kembali. Kedua, yang disebabkan oleh faktor alam seperti petir, hujan yang lebat, angin tornado, dan musim kering. Selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan, misalnya pencemaran udara oleh limbah pabrik, asap kendaraan dan pembakaran sampah. Kondisi tersebut berakibat buruk bagi ekosistem sehingga tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan harus segera dihentikan (Dwidjoseputro, 1987:13).

Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola dan Tidak Terkelola



Sumber : KLHK (2024).

Berdasarkan gambar di atas, Sampah yang sudah terkelola sebanyak 20.162.710,97 ton/tahun dan sampah yang tidak terkelola sebanyak 11.490.332,39 ton/tahun. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar pencemaran

lingkungan, terutama di sungai, dapat diminimalkan.

Tabel 2. Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Kota Tangerang 2020-2024 (Juta/Ton)

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tangerang	49.574	39.311	40.931	41.761	64.807
2.	Jatiuwung	30.386	26.075	27.149	27.699	42.986
3.	Batuceper	27.459	23.157	24.487	24.983	38.771
4.	Benda	27.912	21.341	22.221	22.671	35.183
5.	Cipondoh	89.294	63.418	66.032	67.370	104.551
6.	Ciledug	55.334	41.941	43.669	44.554	69.143
7.	Karawaci	47.468	47.111	49.053	50.047	77.667
8.	Periuk	39.978	36.026	37.511	38.271	59.392
9.	Cibodas	41.026	37.630	39.181	39.975	62.037
10.	Neglasari	31.646	29.515	30.732	31.355	48.659
11.	Pinang	58.017	46.023	47.920	48.891	75.873
12.	Karang Tengah	38.661	30.078	31.317	31.952	49.585
13.	Larangan	55.622	42.311	44.054	44.947	69.752

Sumber: DLH Kota Tangerang (2024).

Dengan tabel ini membuktikan bahwa timbulan sampah di Kota Tangerang belum teratasi dengan baik. Dengan begitu, Kota Tangerang masih memerlukan strategi alternatif selain agar masalah dapat teratasi. Dahulu, masyarakat memanfaatkan sungai sebagai kebutuhan primer, namun kini penggunaan air sungai berkurang akibat pencemaran yang membuatnya tidak lagi layak sebagai sumber air utama.

Dalam Undang-undang tersebut sudah jelas pemberian tugas dan wewenang mengerucut pada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup agar terjamin terselenggaranya pengelolaan sampah di sungai cisadane yang baik dan efektif. Oleh karena itu, adanya kerja sama ini seharusnya pengelolaan sampah di sungai cisadane ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi masalah lingkungan yang ada di wilayah Kota Tangerang.

Permasalahan Pertama, pada indikator kondisi awal terdapat permasalahan konflik pemanfaatan dan konflik kepercayaan yang muncul antar pemangku kepentingan. Konflik kepercayaan ditunjukkan melalui sikap para pemangku kepentingan, khususnya berasal

dari unsur pemerintah yang tidak responsif untuk mewujudkan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati bersama LSM Banksasuci. Sementara itu konflik pemanfaatan yang terjadi berupa permasalahan-permasalahan yang terjadi di DAS Cisadane sebelum dibentuknya forum, sehingga berpotensi mengancam kelestarian sungai.

Permasalahan kedua, pada indikator desain kelembagaan belum dijalankan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaan program pengelolaan sampah di DAS Cisadane aturan dasar yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan masih banyak yang belum dibuat secara resmi seperti Peraturan Daerah. Hal itu tentu akan memicu lahirnya konflik antar daerah.

Permasalahan ketiga, yaitu pada sub-indikator dialog tatap muka belum dijalankan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam menghadiri rapat forum. Kegiatan rapat atau berdiskusi merupakan bagian terpenting dari proses kolaborasi karena kolaborasi dibangun berdasarkan adanya dialog dan interaksi antar para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan rapat forum ini diharapkan hubungan yang terjalin antar stakeholders semakin erat dan menumbuhkan rasa ketergantungan yang tinggi dan rasa percaya satu sama lain, setiap anggota dituntut untuk dapat berinteraksi secara efektif dan efisien terkait dengan prosedur kerja sampai pemecahan sebuah masalah.

Permasalahan keempat, pada sub-indikator Pada sub-indikator hasil sementara belum tercapai secara maksimal dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti Tingginya tingkat run off, tanah longsor, dan sedimen, ancaman terhadap suplai air, dan tingginya volume kiriman sampah masih sering

terjadi sehingga belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Isu sampah merupakan permasalahan multidimensional yang dihadapi setiap kota besar, menuntut solusi kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Ikram, 2020). Studi kasus di Kota Makassar, misalnya, menyoroti inisiatif pemerintah lokal dalam membentuk Bank Sampah sebagai upaya penanganan terpusat di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Sejalan dengan hal tersebut, Prameswari, *et al.* (2024) menegaskan bahwa pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan, seperti yang dihadapi Kota Surakarta, memerlukan pendekatan holistik dan sinergis antarberbagai pihak untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Kompleksitas masalah sampah bahkan bersifat lintas batas, seperti yang diteliti oleh Hidayat, *et al.* (2021) mengenai sampah plastik laut di wilayah utara Jakarta yang terancam oleh kiriman sampah dari daratan maupun lautan lain, menimbulkan ancaman terhadap keamanan maritim dan ekosistem laut. Sementara itu, masalah penanganan sampah tidak terbatas pada wilayah urban; Primus, *et al.* (2023) menunjukkan bahwa penumpukan sampah yang mengganggu akses jalan di Desa Tulung Selapan Timur berhasil diatasi melalui musyawarah dan kompromi bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun fasilitas pengolahan sampah. Secara keseluruhan, literatur terdahulu menggarisbawahi urgensi kolaborasi, inovasi kelembagaan (Bank Sampah), dan keterlibatan komunitas dalam menghadapi tantangan sampah dari skala lokal hingga global.

Berdasarkan paparan literatur terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang sifatnya kolaborasi ini dapat mengurangi permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, maka kebaruan dalam penelitian ini adalah peneliti akan menganalisis

Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang secara mendalam merupakan proses kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang terlibat dalam kerja sama ini. Menurut Ansell and Gash (2007) Hurgard terdapat 4 indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

B. METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang dipilih karena relevan untuk memahami secara mendalam kompleksitas isu dan dinamika hubungan dalam pengelolaan sampah di DAS Cisadane dari berbagai sudut pandang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan peran spesifik dari multi-stakeholder—meliputi pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan akademisi—tanpa terikat pada pengukuran numerik. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari masing-masing pemangku kepentingan, didukung oleh dokumentasi (seperti kebijakan dan laporan resmi) dan observasi langsung di lokasi penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data yang sistematis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk membangun deskripsi yang kaya dan komprehensif mengenai tata kelola persampahan di wilayah tersebut.

C. PEMBAHASAN

Tata kelola kolaboratif mengacu pada metode atau pendekatan yang menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai industri untuk membuat dan melaksanakan suatu program atau kebijakan. Meningkatnya minat terhadap mekanisme tata kelola kolaboratif berasal dari potensi keuntungan yang bisa diperoleh dengan melibatkan banyak aktor dalam mengatasi

permasalahan terkait legitimasi dan kapasitas pemerintah. Berbagai strategi privatisasi dan regulasi tersedia melalui tata kelola kolaboratif, dan strategi ini digunakan dengan harapan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi pemerintah. Seperti halnya dengan butuhnya kerja sama kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di DAS Cisdane dalam penelitian ini.

Seiring dengan berlangsungnya kolaborasi, stakeholder juga harus mengembangkan persepsi yang sama. Maksud dari pemahaman bersama disini adalah kesamaan misi, kesamaan tujuan, kejelasan tujuan, hingga kesamaan ideologi. Pada pengelolaan sampah di DAS Cisdane, Banksasuci memiliki misi yang jelas dan selalu dikomunikasikan pada setiap kesempatan. Strategi dan program aksi yang telah diberikan kepada masing-masing lembaga dalam peningkatan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup di DAS Cisdane menunjukkan hasil yang signifikan.

Tujuan dibentuknya komunitas Banksasuci ini yang digunakan sebagai wadah para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan DAS Cisdane adalah untuk menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi di DAS serta menjaga kelestarian air dan sumber daya alam lainnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Banksasuci telah melakukan berbagai upaya dalam sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan mengimplementasikan perencanaan tersebut dalam program kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada lembaga atau institusi para pemangku kepentingan.

Dengan adanya program jasa lingkungan tingkat kemiskinan pada masyarakat di sekitar DAS Cisdane menjadi berkurang. Hal tersebut membuktikan bahwa konsep yang dikembangkan oleh Banksasuci yakni hubungan hulu-hilir dengan mekanisme pengelolaan

sampah di DAS sudah berhasil diterapkan pada kondisi lingkungan DAS Cisdane. Selain itu, dengan dilakukannya kolaborasi pengelolaan DAS Cisdane ini, menciptakan terbangunnya sistem dan mekanisme dari pengelolaan terpadu DAS yang menjadi landasan bagi para pihak untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan. Dengan begitu konsep pengelolaan dan pengembangan DAS menjadi lebih terstruktur dan terukur dengan penerapan mekanisme yang telah disepakati.

Dengan keberhasilan program-program yang telah dikembangkan Banksasuci dalam upaya pengelolaan sampah di DAS Cisdane, menjadikan Cisdane sebagai referensi penyusunan regulasi pengelolaan sampah di DAS dan jasa lingkungan untuk provinsi lain dan nasional, diantaranya protokol jasa lingkungan yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup, regulasi tentang instrumen ekonomi dan pengelolaan sampah di DAS. Namun disamping itu, hasil yang telah dicapai selama ini belum bisa menunjukkan hasil secara maksimal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di Cisdane. Untuk itu masih dibutuhkan perhatian dan studi lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut serta langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya secara maksimal.

Fokus collaborative governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. Collaborative governance menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Terdapat model collaborative governance salah satunya model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash.

Berikut temuan peneliti di lapangan:

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Tabel 3. Temuan Lapangan

No.	Indikator	Hasil Lapangan
1	Kondisi Awal	1. Kerja sama dilatar belakangi oleh adanya isu lingkungan terkait dengan sungai cisadane yang sampahnya meluap 2. Adanya ketidakseimbangan sumber daya dalam kolaborasi yang terjadi 3. Setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerjasama yang terjadi mendapatkan keuntungan sesuai tupoksinya masing-masing.
2	Desain Kelembagaan	1. Forum khusus belum terbentuk pada kolaborasi yang sedang dilakukan 2. Aturan yang jelas dalam kolaborasi yang terjadi ada pada MoU antar instansi 3. Transparansi tercermin melalui pelaporan progres kegiatan yang dapat diakses oleh semua pihak 4. Semua pihak berpartisipasi, tetapi partisipasi yang terjadi belum merata. Karena masyarakat sendiri tidak dilibatkan secara aktif.
3	Kepemimpinan Fasilitatif	1. Mediator kolaborasi ini yaitu DLH 2. Terdapat komunitas untuk mengelola DAS Cisadane yaitu Banksasuci Foundation 3. Sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal dilakukan.
4	Proses Kolaborasi	1. Pertemuan rutin dilakukan pada saat ada program saja atau bisa juga 1 bulan 2 kali untuk monitoring dan evaluasi, yang mana tidak semua pihak dilibatkan. 2. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pertemuan rutin. 3. Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan informasi, kesetaraan peran, dan diskusi bersama yang mendorong transparansi. 4. Semua pihak berkomitmen pada keberhasilan program, kecuali masyarakat dan kelompok masyarakat yang masih berorientasi pada keuntungan pribadi. 5. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di DAS bagi tujuan jangka panjang. 6. Para aktor memahami tentang misi kolaborasi demi keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti dalam Penelitian ini (2025).

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pengelolaan sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang ini membuktikan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam upaya membangun keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi di DAS Cisadane sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang yang berbeda-beda, diantaranya pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan swasta, akademisi, masyarakat dan kewenangannya. Kesimpulannya, Proses kolaborasi yang terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara sudah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal, dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah di DAS Cisadane tersebut dibutuhkan peningkatan integritas dan kinerja para pemangku kepentingan agar kolaborasi berjalan secara maksimal, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Hal tersebut dikarenakan masalah lingkungan yang terjadi di DAS Cisadane yang mendasari dilakukannya kolaborasi ini belum sepenuhnya terselesaikan.

REFERENSI

Adiyatama, S., Sufianti, E., & Rahman, A. (2024). Strategi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Bank Sampah Cinta Lingkungan di Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.52>

Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Setiyono, B., Novira, A., & Sutiyono, W. (2024). Self-organizing volunteers as a grassroots social innovation: the contribution and barrier to empowerment and collaborative governance in stunting intervention. *Development Studies Research*, 11(1).

<https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2357102>

Afandi, M.N., Novira, A., Anomsari, E.T., Pradesa, H.A. (2024). Applying Collaborative Governance As An Intervention In Stunting Reduction An Empirical Community Empowerment Model In Sukabumi District. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 44 – 64. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50195>

Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.891>

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2021). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348-376.

Dwidjoseputro. (1987). *Ekologi manusia dan lingkungan*. Jakarta: Eresco.

Hayamadi, P. S., Sembodo, A. N. B., Suprapdi, E. D. A. P., & Kamal, U. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan di Kota Surakarta. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(5), 66-82. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Tanggal 17 Mei 2024

Ikram Ikram, M. (2020). Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 94-110.

Kirana, C. A. D., Sufianti, E., & Suryani, S. (2023). Analysis of Knowledge, Motivation, and Benefits to Increase Community Participation in Waste Management; Case study in Pelangi Galaxy Waste Bank

- Bandung City. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 269-271.
- Mukus, P., Amaliatulwalidain, A., & Kariem, M. Q. A. (2023). Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 116-123.
- Nabila, P., Sufianti, E., Nuhroho, A. B., & Harahap, A. S. (2024). Implementasi Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Di KBM Komersial Kayu Jawa Barat dan Banten Perhutani. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(5), 1353-1364.
- Oktoyani, R., Sufianti, E., & Gedeona, H. T. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(2), 109-123.
- Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021, July). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. In *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* (pp. 227-231). Atlantis Press.
- Ruhiyat, R.F., Pradesa, H.A., Novira, A., Wijayanti, R. (2025). Implementation of the Balanced Scorecard for Performance Evaluation at the West Java Provincial Plantation Service. *Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA)*, Vol. 12, No. 1, 14 – 27. <https://doi.org/10.55963/jumpa.v12i1.729>
- Sendari, W. N., & Sufianti, E. (2024). Perspektif Triple Bottom Line Pada Praktik Pengelolaan Berkelanjutan Bank Sampah Induk Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 211-219.
- Soemarwoto, O. (2014). *Ekologi, lingkungan hidup, dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sufianti, E., Ramdani, D.F. (2020). Rintisan Social Entrepreneurship Dalam Menangani Permasalahan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Pelangi Galaxy) [Pioneering Social Entrepreneurship In Handling Household Waste Problems (Case Study Of The Pelangi Waste Bank)]. *SeTIA MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 39 – 47.
- Sufianti, E., Kirana, C. A. D., Rahman, A., Cahyadi, C., Rahmi, Y., & Sundari, W. (2023). Cimanggung open junior high school as collaboration-based education in Cilembu Village Sumedang. In *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)* (pp. 13-22). Atlantis Press.
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75-90. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1588>
- Wisata, P. A., Sufianti, E., & Rahman, A. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Kacapiring Kota Bandung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2302-2314. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17848>
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83-96.